

KONSEP PENDIDIKAN PERSPEKTIF GENDER MENURUT KH. HUSEIN MUHAMMAD

Fitriah

STAI Ma'had Ali Cirebon

email: Fitriahyahya1986@gmail.com

abstrak

Gender adalah konstruksi sosial yang menjelaskan tentang peran manusia berdasarkan jenis kelamin. Sebab itu, masalah gender lahir dan dipertahankan oleh masyarakat. Masyarakat umumnya didominasi oleh peran laki-laki (patriarki). Laki-laki memiliki peran publik (bekerja, berorganisasi, berpolitik), sementara perempuan memiliki peran privat (mengurus anak, mencuci, melahirkan, memasak). Ini merupakan konstruksi gender yang mainstream. Pada perkembangannya, kaum perempuan merupakan jumlah yang cukup banyak di masyarakat. Mereka memiliki potensi publik (berorganisasi, berpolitik, dan bekerja) yang ternyata setara dengan laki-laki. Namun, potensi tersebut terhambat untuk muncul akibat pembatasan oleh budaya gender yang patriarkis. Sebab itu, muncul gerakan emansipasi wanita (kini dikenal dengan feminis) yang berupaya menstarakan peran laki-laki dan perempuan, baik di sektor publik maupun privat. Pembahasan tentang bagaimana feminisme lahir dimulai dengan pemaparan tentang bagaimana masyarakat memandang tentang perempuan, hingga munculnya kesadaran dari sekelompok orang (yang berperan sebagai *agent of change*) terhadap adanya ketidakadilan (tidak egaliter) terhadap perempuan di dalam cara pandang masyarakat tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majalah dan naskah yang ada kaitannya dengan topik pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Data-data yang dikumpulkan dibaca.

Pendidikan yang berbasis pada keadilan dan persamaan; keadilan dipahami sebagai pemberian hak yang jelas sesuai dengan tabiat dan rekayasa sosial, sedangkan persamaan adalah menyamakan status kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan yang memberikan peluang dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan; dan ini bisa dibuktikan dengan tanpa adanya sekat-sekat kultural yang bisa mendiskreditkan peran perempuan, seperti hak mengajar, hak berpendapat, hak ruangan, dan hak sosial kultural.

Kata kunci. Gender, Pendidikan, Kh. Husein Muhammad

I. PENDAHULUAN

Wacana feminisme muncul dan dikenal di Indonesia kurang lebih sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Zaman kaum perempuan bergerak di Indonesia dibuka oleh pikiran R.A. Kartini yang memperjuangkan hak wanita dalam memperoleh pendidikan sampai terbangunnya organisasi-organisasi perempuan sejak tahun 1912. Sejarah perbedaan

gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang. Sebagai hasil kreasi masyarakat, perbedaan gender ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang di masyarakat seperti tradisi, adat istiadat, corak budaya, ajaran agama, dan bahkan kebijakan Negara.

Gender adalah konstruksi sosial yang menjelaskan tentang peran manusia berdasarkan jenis kelamin. Sebab itu, masalah gender lahir dan dipertahankan oleh masyarakat. Masyarakat umumnya didominasi oleh peran laki-laki (patriarki). Laki-laki memiliki peran publik (bekerja, berorganisasi, berpolitik), sementara perempuan memiliki peran privat (mengurus anak, mencuci, melahirkan, memasak). Ini merupakan konstruksi gender yang mainstream. Pada perkembangannya, kaum perempuan merupakan jumlah yang cukup banyak di masyarakat. Mereka memiliki potensi publik (berorganisasi, berpolitik, dan bekerja) yang ternyata setara dengan laki-laki. Namun, potensi tersebut terhambat untuk muncul akibat pembatasan oleh budaya gender yang patriarkis. Sebab itu, muncul gerakan emansipasi wanita (kini dikenal dengan feminis) yang berupaya mensterilkan peran laki-laki dan perempuan, baik di sektor publik maupun privat. Pembahasan tentang bagaimana feminisme lahir dimulai dengan pemaparan tentang bagaimana masyarakat memandang tentang perempuan, hingga munculnya kesadaran dari sekelompok orang (yang berperan sebagai *agent of change*) terhadap adanya ketidakadilan (tidak egaliter) terhadap perempuan di dalam cara pandang masyarakat tersebut.

Perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran sosial. Kadangkala peran sosial tersebut dibakukan oleh masyarakat, sehingga tidak ada kesempatan bagi perempuan atau laki-laki untuk berganti peranan. Dalam tradisi Jawa, pembakuan peran ini diungkapkan dalam banyak pepatah, misalnya, perempuan adalah *konco wingking* dari laki-laki yang menjadi suaminya. Ia adalah teman hidup yang perannya selalu di belakang. Pepatah tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa tugas perempuan adalah di belakang. Dalam budaya Jawa, istilah belakang tidak saja menunjuk arah tetapi bisa berarti sebuah ruangan, yakni dapur, yang letaknya biasanya memang di belakang dan terkesan tersembunyi dan disembunyikan (tidak kelihatan).

Wacana gender ini telah merambah ke berbagai sendi kehidupan, tak terkecuali dalam lembaga pendidikan Islam seperti pesantren misalnya yang basicnya adalah lembaga *taffauh fiddin* yang dinilai banyak menguntungkan kaum laki-laki dengan ajaran dan sistem pembelajarannya. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa selama ini agama (baca: penafsiran keagamaan maupun lembaga-lembaga keagamaan), termasuk pesantren seringkali dipandang sebagai penyebab ketidakadilan gender. Pesantren seringkali dipandang sebagai institusi yang memiliki pemahaman keagamaan yang tradisional, konservatif, dan kolot dan diwarnai oleh penafsiran keagamaan yang mendiskriminasi hak-hak perempuan. Kasus-kasus ketidakadilan gender seperti nikah sirri, nikah dini, poligami, kekerasan terhadap perempuan dipandang banyak 'dijamin' bahkan dilakukan oleh sebagian kalangan pesantren. Lagi pula wajah patriarkis yang direpresentasikan dengan banyaknya tokoh laki-laki (Kyai, Tuan Guru), sangat berpengaruh dalam pengelolaan pesantren. Meskipun, dalam kenyataan sejarah

telah dijumpai nama-nama tokoh perempuan seperti Nyai Hajjah Nonoh Hasanah, yang merintis lahirnya pesantren putri.

Salah satu sarana pendidikan agama yang masih cukup intens mempertahankan perspektif maskulin dalam pandangan keberagamaannya adalah pesantren. Padahal, dari pesantrenlah banyak lahir para kyai, ustadz atau da'i yang kemudian akan mentransformasikan ajaran agama dan keberagamaan pada masyarakat luas. Akibatnya, ajaran agama dan keberagamaan masyarakat tidak akan jauh berbeda dengan apa yang telah diajarkan di pesantren. Termasuk di dalamnya adalah ajaran agama dan keberagamaan yang patriarkal tersebut.

Seiring berjalannya waktu, respon positif terhadap wacana feminisme justru datang dari kalangan ulama pesantren yang menurut beberapa pihak dianggap kolot, paternalistik, feodal dan patriarkhal. Bahkan kalangan Islam tradisional ini dianggap bersikap konservatif dan curiga terhadap perubahan. Ini ditunjukkan dengan munculnya gagasan-gagasan baru tentang feminisme Islam dari kelompok 'Islam tradisional', seperti Masdar Farid Mas'udi, salah seorang pelopor feminisme di kelompok Islam tradisional dan KH. Husein Muhammad yang dikenal sebagai Kyai Feminis. Di sinilah peran utama lembaga pendidikan Islam seperti; pesantren dan tokoh agama yaitu ulama, dalam merespon wacana-wacana demokrasi, pluralisme, feminisme dan lain-lain.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu sebuah penelitian yang akan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukan dianalisis dan disajikan secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami atau disimpulkan, sejalan dengan sifat penelitian deskriptif, maka bentuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk kualitatif yaitu suatu penelitian yang tidak dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majalah dan naskah yang ada kaitannya dengan topik pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Data-data yang dikumpulkan dibaca, dipahami dan dirumuskan substansinya untuk kemudian diperbandingkan dengan tulisan (literatur) lain sehingga dihasilkan sintesa penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif yakni yang berhubungan dengan pembahasan masalah. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam sumber data, yaitu data Primer dan data Sekunder.

Dalam rangka untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang diteliti, diperlukan prosedur pengumpulan data. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian observasi yaitu metode

pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dokumentasi merupakan salah satu metode/teknik pengumpulan data yang banyak dipakai dalam penelitian kualitatif. Data dokumentasi yang digunakan dalam bentuk pengumpulan data dari berbagai sumber buku keilmuan yang mencakup dengan pendidikan. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul maka data tersebut akan dianalisis semua konsep pokok satu persatu. Semua dilakukan tanpa kehilangan objektivitasnya.

III. PEMBAHASAN

A. Biografis KH. Husein Muhammad

1. Kelahiran dan Perjalanan Pendidikan KH. Husein Muhammad

Husein Muhammad lahir di Cirebon tepatnya di Arjawinangun pada tanggal 9 Mei 1953 di Pondok Pesantren Dar at-Tauhid. Nasab kyai diperoleh dari ibunya yang merupakan putri pendiri pesantren tersebut yaitu KH. Syathori, sedangkan ayahnya hanyalah orang biasa yang diambil menantu oleh KH. Syathori. Akan tetapi walaupun orang biasa Kyai Muhammad Asyrofuddin juga merupakan keturunan keluarga yang biasa mengenyam pendidikan pesantren. Sehingga secara kultural Husein Muhammad lahir dan tumbuh dari keluarga pesantren. Saudara kandung KH. Husein Muhammad berjumlah delapan orang.

Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, melalui figur kakek beliau yaitu KH. Syathori pada masanya sudah berpikir dan bersikap sangat moderat, dengan memulai/mempelopori merumuskan pendidikan pesantren secara modern pada masa itu. Di antaranya, yaitu dengan menggunakan papan tulis, kelas-kelas, dan bangku-bangku. Padahal di pesantren lain hal seperti itu dianggap masih terlarang. Jadi, sejak awal pesantren di mana Husein hidup sudah memberi ruang pada hal-hal yang berbeda dan mendorong kemajuan.

Husein Muhammad belajar agama sejak kecil di pesantren. Di samping belajar madrasah (sekolah) diniyah (agama) pesantren, saya juga belajar di SD selesai tahun 1966, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Arjawinangun selesai tahun 1969, dan di SMP saya sudah mulai aktif di dalam organisasi sekolah bersama rekan-rekan dan juga menghafalkan Al-Qur'an sampai memperoleh tiga juz." Hal ini pula yang menunjukkan bahwa lingkungan pesantren Husein telah memberikan ruang yang baik untuk kemajuan, dengan membolehkan anak-anak kyai menempuh pendidikan umum, yang pada masanya hal tersebut sangat dilarang oleh para kyai di pesantren.

Setelah tamat SMP, Husein Muhammad melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri selama tiga tahun sampai 1973. Pesantren Lirboyo ini adalah pesantren yang masih tradisional (salaf). Setelah tiga tahun belajar di Pesantren Lirboyo dan tamat dari Lirboyo tahun 1973, pengembaraannya dalam mencari ilmu dilanjutkan ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, sebuah perguruan tinggi yang mengkhususkan kajian tentang Al-Qur'an dan mewajibkan mahasiswanya hafal Al-Qur'an. Di PTIQ ini Husein Muhammad sekolah selama 5 tahun sampai tahun 1980. Ketika belajar di PTIQ Husein Muhammad melanjutkan hafalan Al-Qur'annya hingga selesai.

Selama di PTIQ ini Husein sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, baik ekstra maupun intra kampus. Husein bersama seorang temannyalah yang kemudian memelopori adanya majalah dinding dalam kampus itu, dalam bentuk tulisan reportase. Keakraban Husein dengan jurnalistik karena ia pernah mengikuti pendidikan jurnalistik dengan Mustofa Hilmy yang pernah menjadi redaktur *Tempo*. Pendidikan jurnalistik dan pengalaman membuat majalah dinding ini memberikan Husein kemampuan untuk menulis dengan cukup baik. Husein juga pernah menjadi ketua I Dewan Mahasiswa, bahkan pernah menjadi ketua umum Dema PTIQ pada tahun 1979. Husein beserta teman-teman kampusnya juga mendirikan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Kebayoran Lama. Semua aktifitas selama masa kuliah menunjukkan bahwa Husein Muhammad memang orang yang tidak mau membuang waktunya sia-sia. Husein Muhammad selalu ingin mengisi waktunya dengan mengkaji berbagai pengetahuan.

Secara teoritik Husein tamat kuliah pada tahun 1979, namun baru wisuda pada tahun 1980. Dan pada tahun ini juga Husein berangkat ke Kairo Mesir untuk melanjutkan kuliah di al-Azhar University. Menurutny: “Di Kairo saya berniat mencari ilmu yang disarankan oleh guru saya di PTIQ, yaitu Prof. Ibrahim Husein guna mempelajari ilmu tafsir Al-Qur’an.” Menurut Husein, Kairo lebih terbuka dalam bidang pengetahuan dibandingkan dengan Negara-negara Timur Tengah lainnya. Meski begitu, Husein melihat sistem pendidikan di al-Azhar masih sangat tradisional, dan para mahasiswanya banyak yang tidak belajar. Mahasiswa al-Azhar menurut Husein belajar hanya ketika mendekati waktu ujian saja.

Melihat fenomena tersebut gairah Husein untuk belajar secara formal di al-Azhar menurun, tetapi gairah untuk mencari ilmu pengetahuan tetap kuat. Bahkan kesempatan untuk membaca buku sangat terbuka luas, apalagi dengan buku-buku dan kitab-kitab yang jarang sekali (atau tidak sama sekali) ditemukan di Indonesia yang dikarang oleh para pemikir besar, seperti Qasim Amin, Ahmad Amin, dan lain-lain, dan dimanfaatkan oleh Husein muda secara baik. Di samping karya-karya Islam, Husein juga membaca buku-buku filsafat atau sastra dari pemikir Barat yang ditulis dengan bahasa Arab yang ditemukan di Kairo, seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain-lain. Husein lebih menikmati membaca karya-karya pemikir besar tersebut dibandingkan dengan kuliah. Husein belajar di Mesir selama tiga tahun, dan tahun 1983 Husein pulang ke Indonesia untuk meneruskan jejak kakeknya mengembangkan pesantren Dar at-Tauhid.

2. Keterlibatan KH. Husein Muhammad dengan Gender

Keterlibatan pertama kali Husein dalam perkembangan pemikiran yang lebih progresif termasuk berkenalan dengan wacana gender, dimulai oleh ajakan Masdar Farid Mas’udi, yang ketika itu sebagai direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Masdar selalu mengundang Husein untuk mengikuti seminar atau *halaqah*. Dan pada tahun 1993, Husein diundang dalam seminar tentang “perempuan dalam pandangan agama-agama kurun waktu yang panjang, kaum perempuan mengalami penindasan dan sering dieksploitasi”. Sejak itu Husein mengetahui ada masalah besar

mengenai perempuan. Dalam. Dari sanalah Husein diperkenalkan dengan gerakan feminisme, gerakan yang berusaha untuk memperjuangkan martabat kemanusiaan dan kesetaraan sosial (gender).

Husein mula-mula menilai gerakan feminisme sebagai gerakan pemberontakan terhadap laki-laki, lembaga keluarga dan kemasyarakatan yang sudah mapan, dan seperti halnya para pemula yang biasa memandang persoalan baru dengan penuh curiga. Untuk memahami secara lebih mendalam akar persoalan ketidakadilan terhadap perempuan ini, Husein dikenalkan dengan analisis gender, sejumlah ideologi, dan teori yang membantu untuk melihat persoalan tersebut secara jernih dan objektif.

Dalam seminar tentang “Perempuan dalam Pandangan Agama-agama”, ia merasa disadarkan bahwa ada peran para ahli agama (agamawan), bukan saja Islam tetapi dari seluruh agama, yang turut memperkuat posisi subordinasi perempuan. Husein mempunyai pemikiran, bagaimana mungkin agama bisa menjustifikasi ketidakadilan, sesuatu yang bertentangan dengan hakikat dan misi luhur diturunkannya agama kepada manusia. Dan setelah itu, Husein mulai tertarik untuk menganalisis persoalan ini dari sudut basis keilmuan yang diterimanya dari pesantren.

Basis pemikiran Husein adalah demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pikiran terhadap kajian perempuan ini awalnya lebih sebagai kebetulan ketika Husein dikenalkan pada masalah-masalah perempuan, yang ternyata ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia itu. Kajian itu semakin intensif ketika orang banyak memberikan kesempatan kepada Husein untuk memberikan pandangan hak asasi manusia berkaitan dengan perempuan dipandang dari fiqh (hukum Islam) atau perspektif Islam. Selanjutnya Husein belajar dengan intensif, dan ia kemudian melakukan analisis kritis tentang paradigma keadilan dan demokrasi. Dari situlah masalah-masalah perempuan menjadi kajian serius Husein, dan akhirnya menjadi pilihan untuk melakukan pembelaan terhadap perempuan di tingkat wacana dan praktik pesantren.

Pembelaan terhadap perempuan menurut Husein adalah sangat strategis bagi pembangunan manusia. Banyak orang beranggapan bahwa masalah penindasan terhadap perempuan adalah masalah yang tidak besar. Padahal masalah perempuan (ketidakadilan terhadap perempuan dan subordinasi perempuan) adalah masalah besar, karena perempuan adalah bagian dari manusia, juga bagian dari jenis manusia, dan ketika perempuan dijadikan nomor dua, maka ini sebenarnya adalah masalah besar bagi kemanusiaan.

Husein berpendapat bahwa pemahaman ‘agama’ terhadap perempuan masih sangat bias, masih menomorduakan, dan memarginalkan. Agama di sini adalah penafsiran terhadap teks, di mana banyak orang menganggap bahwa teks itu agama yang memiliki sakralitas dan keabadian. Husein memilih untuk menganalisis agama dan perempuan, karena dia punya keyakinan bahwa agama tidak mungkin melakukan penindasan, marginalisasi, dan kekerasan terhadap siapa pun termasuk perempuan. Namun ketika

banyak orang mengatakan bahwa teks agama menerangkan terjadinya penindasan maka berarti orang tersebut sudah melakukan justifikasi, bahwa agama yang melakukan kekerasan terhadap perempuan.

B. faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Perspektif Gender

Paradigma Husein tentang gender berawal dari pengertian gender itu sendiri. Husein mengungkapkan bahwa gender merupakan refleksi sosial budaya. Jika kebudayaan merupakan realitas kehidupan masyarakat manusia yang meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku manusia keseharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran, dan keyakinan-keyakinan, maka kebudayaan yang nampak di sekitar kita secara umum masih memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki. Orang boleh menyebutnya sebagai budaya patriarki. Dalam kebudayaan ini, memapankan peran laki-laki untuk melakukan dan menentukan apa saja, disadari atau tidak, mendapatkan pembenaran. Sebaliknya kaum perempuan berada dalam posisi subordinat. Ia menjadi bagian dari laki-laki dan menggantungkan nasib hidupnya kepada laki-laki. Otonomi perempuan berkurang. Pada gilirannya, keadaan ini sering kali terbukti melahirkan sebuah proses marjinalisasi, bahkan juga eksploitasi dan kekerasan atas kaum perempuan. Ini terjadi dalam segala ruang, baik domestik maupun publik.

Sebagai seorang feminis, gagasan pembelaannya terhadap kaum perempuan dalam perspektif Islam beliau katakan dengan sebutan ‘membela keadilan’. Dalam wawancara KH. Husein Muhammad mengatakan:

“Sebetulnya yang paling tepat bagi saya adalah membela keadilan, dan membela keadilan adalah tuntutan agama-agama. Ini karena memang dalam realitasnya perempuan diposisikan dalam ketidakadilan, karena manusia yang memiliki ‘intelektual’ untuk memimpin ternyata tidak memimpin, atau pemimpin yang dipaksakan dari laki-laki yang tidak bisa memimpin padahal ada perempuan yang mampu dalam memimpin. Dan ini juga bisa dirasakan oleh laki-laki, tidak dapat kerja untuk menghidupi keluarga, dipaksa untuk kerja. Padahal perempuan bisa tapi tidak diperbolehkan. Dan ini akan mengakibatkan kekerasan, karena kekuasaan cenderung melakukan kekerasan, dan dalam situasi emosional, atau kepentingan, seringkali kekerasan dimunculkan sebagai pembelaan diri, dan kesalahan selalu dialamatkan oleh orang yang lemah.”

Faktor faktor yang mempengaruhi pendidikan perspektif gender menurut KH. Husein Muhammad adalah sebagai berikut;

1. Pendidikan Sekolah/Madrasah dan Pesantren

KH. Husein Muhammad merangkum beberapa faktor kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, terpresentasi juga dalam dunia pendidikan. Bahkan proses dan institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisaikan dan melestarikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam pesantren dan masyarakat pada umumnya. Secara garis besar menurut KH. Husein Muhammad fenomena kesenjangan

gender dalam pendidikan (pendidikan Islam: pesantren) dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain:

- a. Kurangnya partisipasi (*under-participation*). Dalam hal partisipasi pendidikan, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan jenisnya tak terkecuali di pesantren. Partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah, apalagi dalam pendidikan keagamaan (pesantren) yang *notabenenya* adalah pendidikan tradisional *tafakkuh fiddin*.
- b. Kurangnya keterwakilan (*under-representation*). Partisipasi perempuan dalam pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan kecenderungan *disparitas progresif*. Jumlah guru/ustadzah perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki.
- c. Perlakuan yang tidak adil (*unfair treatment*). Kegiatan pembelajaran dan proses interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan, karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan tinggi.

2. Pemahaman Terhadap Teks Keagamaan

KH. Husein Muhammad melihat bahwa memahami teks keagamaan seringkali menjadi pemicu utama dalam menangkap pesan yang terkandung dalam teks itu sendiri. Memahami teks secara skriptualistik, tekstual dan doktrinal akan melahirkan pemahaman yang statis, stagnan dan kaku. Oleh karenanya, produk yang dihasilkan dari teks itu sering memunculkan aroma keberpihakan terhadap realitas sosial dan pada kondisi tertentu.

Menurut KH. Husein Muhammad, bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang. Melalui pemahaman teksual teks-teks keagamaan, kaum perempuan seakan-akan diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), dimarginalkan dan bahkan didiskriminasi. Ini dapat dilihat secara nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun publik. Para feminis mengemukakan bahwa posisi-posisi perempuan demikian itu di samping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak kaum laki-laki.

3. Kondisi Sosial

Pengaruh dalam pertumbuhan psikologis seseorang banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang meliputi tradisi, budaya, adat istiadat, baik dalam skala mikro atau makro. Contoh sederhananya adalah; Sejak kecil perempuan diajarkan untuk tidak mengemukakan pendapat sendiri, perempuan terbiasa mengalah dan yang diberi kebebasan adalah saudara laki-laki, maka, akibat dari itu semua berimplikasi kepada diri perempuan itu sendiri seperti:

- a. Perempuan kurang percaya diri (*self confidence*) karena kemampuan mereka memang masih terbatas.

- b. Perempuan kurang berusaha merebut peluang.
- c. Perempuan kurang mendapat dukungan, baik dari keluarga maupun masyarakat, kadang mendapat cemoohan apabila perempuan bekerja di sektor publik terutama pekerja seks komersial, pub, dan diskotik. Meskipun pajak jasa tetap disetor ke pihak pengelola.
- d. Perempuan masih terbelunggu oleh *stereotype* sebagai penjaga ranah domestik.
- e. Perempuan masih kurang memiliki kemampuan menawar (*bargaining*).
- f. Perempuan masih terkungkung dalam tradisi misogonis; dan
- g. Perempuan masih dihadap oleh pemahaman dan penafsiran agama yang bias nilai-nilai patriarki dan bias gender.

Menanggulangi hal-hal di atas, tentunya pihak *steakholder* berusaha menterjemahkan ulang kondisi-kondisi sosial yang dikembangkan melalui pemahaman bersama baik lewat pendidikan kultural, keagamaan, atau emosional. Karena masalah sosial bersifat dinamis, namun bila tidak ada tahap negoisasi sebagai rekontruksi sosial akan terus bertahan dan berada dalam lingkup yang mandul.

C. **Mainstream Pendidikan Pesantren Umumnya dan Pemikiran KH. Husein Muhammad**

Pola pikir masyarakat terhadap dunia keislaman, terekonstruksi oleh pemikiran yang selama ini menjadi mainstream pemikiran di pesantren, yang telah berkembang menjadi suatu pemahaman yang mutlak dan tabu. Sehingga menurut sebagian orang merupakan suatu doktrin agama yang tidak akan bisa berubah. Tak terkecuali isu gender yang belakangan ini semakin kuat dan gencar untuk dianalisis

Beberapa kisah yang kental bias gendernya dan dinukil dari tradisi pesantren seringkali tersebar luas di masyarakat. Ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para muballigh di masyarakat juga kerap mengutip ayat-ayat maupun hadits-hadits yang tidak terlalu *gender friendly*. Sebagai contoh, adalah larangan ke luar rumah bagi seorang istri tanpa seizin suami meskipun ayahnya si isteri menghembuskan nafas terakhirnya, laknat bagi isteri yang menolak diajak berhubungan seksual oleh suaminya, larangan ke luar rumah tanpa mahram, begitu mewarnai benak masyarakat. Oleh karenanya, banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga hanya ‘didiamkan’ karena tuntutan keikhlasan perempuan untuk menerima apapun perlakuan sang suami. Tak heran kasus-kasus poligami maupun nikah dini seperti yang menimpa gadis cilik dari Semarang, Lutviana Ulfa merupakan sesuatu yang dianggap sangat biasa dan saat ini masih ada.

Berdasarkan basis pemahaman kepesantrennya, Husein menjelaskan bahwa posisi perempuan di tengah-tengah masyarakat Islam, khususnya masyarakat pesantren yang sangat memarjinalkan dan mensubordinasi perempuan. Subordinasi ini karena ada ajaran-ajaran dalam literatur-literatur (kitab kuning) pesantren, yang memberikan legitimasi bahwa perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Literatur (kitab kuning) yang sangat terkenal di kalangan pesantren tersebut adalah kitab *‘Uqud al-Lujjayn* karya Muhammad an-Nawawi bin Umar yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Nawawi.

Penelitian yang dilakukan Martin Van Bruinisen dengan jelas memperlihatkan bagaimana pondok pesantren memberikan respons yang cukup tinggi terhadap kitab '*Uqud al-Lujjayn*'. Kitab '*Uqud al-Lujjayn*' relatif tipis hanya 22 halaman yang terdiri dari empat pasal dan penutup. Pasal pertama membicarakan tentang kewajiban laki-laki (suami); pasal kedua, tentang kewajiban perempuan (istri); pasal ketiga; keutamaan shalat perempuan di dalam rumah; pasal keempat, tentang haramnya pandang-memandang antara laki-laki dan perempuan; dan pada bagian penutup dijelaskan mengenai hal-hal kaum perempuan modern, paling tidak pada zaman di mana beliau hidup.

Husein menilai bahwa secara umum, pandangan Nawawi dalam kitab ini memperlihatkan kecenderungannya yang sangat kuat terhadap perspektif patriarki. Laki-laki, menurut pandangan ini, memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan dan diberikan hak untuk mengatur dan menentukan hampir segalanya. Sebuah pandangan yang memberikan kepada laki-laki sebuah posisi lebih tinggi daripada perempuan. Jadi ada perspektif superioritas laki-laki. Pada pasal dua, tentang hak laki-laki (suami), misalnya, Nawawi memaparkan firman Allah dalam surat '*an-Nisaa*' ayat 34. Imam Nawawi menafsirkan kata *qawwamun* dengan: "orang-orang yang berkuasa mendidiknya". Nawawi menilai kekuasaan itu sebagai kelebihan laki-laki secara kodrati. Menurut Husein, pandangan Nawawi ini sangat *stereotype* dan bias gender karena penjelasan ayat tersebut belum tuntas dibelakang kalimat *qawwamun* ada kalimat berikutnya *bima fadhdhala Allah ba'dhahum 'ala ba'dh* (disebabkan Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain), tidak seluruh laki-laki bisa memimpin perempuan karena hanya sebagian laki-laki saja yang diberikan kelebihan oleh Allah atas sebagian perempuan, karena ayat tersebut tidak berbunyi *bima fadhalahum 'alaihinna* (disebabkan karena Allah melebihkan laki-laki atas kaum perempuan).

Husein memberikan gagasan tentang agama berbeda dengan kyai-kyai lain di pesantren, diantaranya adalah ketika menjelaskan tentang agama dan keadilan yang menjadi inspirasi Husein untuk berpihak terhadap gerakan perempuan. Menurut Husein: "Substansi agama adalah keadilan, dan norma keadilan harus disesuaikan dengan realitas, ketika realitas itu tidak sesuai dengan norma agama yang berkeadilan, maka menurut saya yang salah adalah realitas itu, maka realitas itu harus disesuaikan dengan substansi agama yaitu keadilan".

Karenanya, dalam metodologi Husein, ada hal-hal yang sangat spesifik dalam agama/teks-teks keagamaan, yaitu kontekstual, tidak bisa berlaku abadi di mana saja dan kapan saja. Yang tidak berubah dari ruang dan waktu, di mana dan kapan saja adalah norma keadilan atau substansi agamanya, yaitu keadilan. Karena penyimpangan penafsiran teks keagamaan dari substansi agama yang dilakukan banyak orang dan lembaga keagamaan, maka Husein punya kepentingan untuk melakukan kajian dan kritik terhadap penafsiran teks-teks kembali agar memiliki substansi agama, yaitu keadilan.

Oleh karena itu, menurut Husein kita harus melakukan transformasi dalam tataran wacana/materi pendidikan pesantren. Harapan Husein adalah semakin banyak orang yang

menulis kitab/materi untuk pesantren yang sesuai dengan realitas yang berkembang atau sedang dialami yang mengusung nilai universal Islam yaitu keadilan dan kesetaraan. Proses yang dilakukan tentu secara gradual tidak langsung membuang materi-materi yang sudah mapan di pesantren, tetapi dengan analisis realitas. Benturan yang dihadapi Husein dengan pesantren ketika mengembangkan wacana persamaan antara laki-laki dan perempuan sangat keras, terutama dengan kekuasaan pesantren lain, atau dengan kyai pesantren yang memiliki perbedaan pandangan dalam melihat teks agama yang berperspektif gender. Kyai pesantren pada umumnya melihat perempuan selalu berada di bawah laki-laki sesuai dengan teks-teks agama yang berkembang dalam kitab-kitab klasik.

D. Gagasan dan Konsep Pendidikan Perspektif Gender Menurut KH. Husein Muhammad

Husein beranggapan bahwa dalam konsep kesetaraan gender yang ideal memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang pendidikan, spiritual maupun urusan karier profesional, tidak boleh dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin tertentu saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih prestasi secara optimal. Namun, dalam kenyataan masyarakat konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

KH. Husein Muhammad mendefinisikan pendidikan perspektif gender adalah:

“Pendidikan yang memberi ruang yang setara bagi laki laki dan perempuan, dan tidak ada pembedaan di antara keduanya, jadi yang ditekankan memberi hak/ruang, kalau tidak mau yah sudah, tapi pendidikan harus memberikan ruang sama pada laki dan perempuan.”

Seperti diketahui metode pembelajaran yang pada umumnya dilakukan oleh pesantren adalah metode pembelajaran yang lebih menekankan transmisi keilmuan klasik, yang memungkinkan adanya penerimaan ilmu secara yang tak terbantahkan, yang memberi ruang gerak yang sempit bagi adanya dialog dan diskusi kritis. Sementara itu, persoalan gender sarat dengan problematik-problematik kultural yang sulit diselesaikan tanpa adanya dialog dan diskusi-diskusi. Metode pembelajaran ini, jika diterapkan apa adanya, jelas tidak akan membuahkan hasil yang baik. Oleh sebab itu harus diupayakan kesempatan untuk terjadinya dialog dan diskusi-diskusi, agar konsep-konsep penting pendidikan gender dapat lebih mudah terserap oleh para santri.

Menurut KH. Husein Muhammad, cara strategis memasukan pendidikan gender dalam pesantren adalah dengan memasukan kurikulum pesantren, dan kurikulum dikatakan efektif manakala kurikulum tersebut dapat diimplementasikan dan semua peserta didik mampu mengikutinya tanpa diskriminatif. Hal ini penting diupayakan mengingat kurikulum merupakan jantungnya aktifitas pendidikan. KH. Husein Muhammad mencirikan implementasi kurikulum berbasis gender, antara lain adalah:

1. Semua peserta didik memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh pengalaman belajar sebagaimana yang tertera dalam kurikulum yang berlaku;
2. Materi pembelajarannya dikembangkan dari berbagai sumber dan tidak bias gender; dan

3. Menekankan pada partisipasi yang sama semua peserta didik dalam proses transmisi dan transformasi pengalaman belajar di pesantren, sekolah atau kelas.

Melihat berbagai persoalan tersebut, apabila kita kaitkan dengan pesantren yang termasuk salah satu lembaga pendidikan Islam yang telah berkembang di Indonesia, dan telah mampu membentuk pola pemikiran kyai, santri dan masyarakat pada umumnya. Maka KH. Husein Muhammad dalam kapasitasnya sebagai kyai pesantren dan tokoh feminis memberikan gambaran atau konsep tentang pendidikan perspektif gender yang selama ini menjadi gagasan-gagasan sebagian besar para feminis adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Emansipatoris

Paradigma emansipatoris adalah sebuah paradigma pembebasan, jadi makna emansipatoris dalam hal ini adalah pembebasan manusia dari belenggu-belenggu baik itu belenggu politik, ekonomi, sosial, pendidikan, maupun belenggu yang lainnya. Dan belenggu inilah yang perlu dibebaskan dari pendidikan Islam agar menjadi manusia yang bebas dari kemiskinan, keterpurukan, kebodohan. Ide-ide dasar pemikiran pendidikan Islam emansipatoris memang banyak dipengaruhi oleh Asghar Ali Engineer, Farid Esack, dan Hasan Hanafi. Prinsip-prinsip dasar dalam mengembangkan pendidikan emansipatoris adalah sebagai berikut: keterbukaan Al-Qur'an, keadilan, pembebasan, kemanusiaan, pluralisme, sensitifitas gender, dan non-diskriminatif.

Sehingga menurut paradigma Husein, dalam pendidikan pesantren hendaknya menerapkan sebuah konsep emansipatoris sebagai berikut; (1) Reinterpretasi terhadap teks-teks klasik (Al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab klasik) yang bias terhadap perempuan. (2) Menerapkan sebuah sistem demokratis dan egalitarian tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. (3) Menciptakan relasi yang berkeadilan dan kesetaraan gender. (4) Menumbuhkan daya kritisitas santri. Kesadaran kritis merupakan titik tolak pemikiran pendidikan yang memberdayakan. Tanpa kesadaran kritis, tak mungkin pemberdayaan dapat dilakukan.

2. Pendidikan Feminis

Pendidikan feminis adalah salah satu aliran dari model pendidikan yang ingin membangun kesadaran kritis dan analisis kritis terhadap realita sekaligus mendorong aksi-aksi transformatif untuk keadilan dan kesetaraan. Setidaknya ada empat aspek perubahan yang terjadi setelah mereka melakukan pendidikan feminis. *Aspek pertama* yang dibangun adalah aspek kesadaran, yaitu bagaimana membangun kesadaran perempuan akan ketertindasannya yang disebabkan oleh jenis kelaminnya. *Aspek kedua* adalah membangun komitmen. Setelah ada kesadaran akan ketertindasan, diharapkan ada komitmen untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan tersebut baik dalam lingkup terkecil keluarga maupun masyarakat. *Aspek ketiga* adalah aspek politik. Setelah memiliki kesadaran dan komitmen, diharapkan muncul tindakan-tindakan politik perempuan. Tindakan politik ini tidak sama dengan pemahaman politik pada umumnya. Perjuangan politik bagi feminis ini tidak harus menyangkut kehidupan politik publik dan melibatkan diri ke berbagai kelompok, tetapi dengan membuka pengalaman dirinya

sebagai orang yang tertindas di dalam keluarga sudah dapat dianggap berpolitik. *Aspek keempat* adalah budaya. Pendidikan feminis ini melihat bahwa budaya sebagai sesuatu yang dinamis yang senantiasa mengalami perubahan yang lebih baik bagi kehidupan. Jika dalam suatu masyarakat, budaya yang ada justru melakukan ketidakadilan terhadap perempuan, maka perubahan budaya merupakan suatu keharusan. Untuk itulah perempuan korban penindasan dapat membangun budaya sendiri yang membawa kesetaraan bagi semua pihak dan pendidikan feminis mendorong perempuan mengembangkan budaya yang terbuka dan adil.

3. Pendidikan Kerakyatan

Suatu konsep pendidikan perspektif gender yang dapat diterapkan di masyarakat menurut KH. Husein Muhammad adalah perlu adanya pendidikan kerakyatan sebagai dasar persamaan pendidikan yang dapat menghantarkan setiap individu atau rakyat mendapatkan pendidikan. Sedangkan ciri pendidikan kerakyatan adalah perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik. Dan ini merupakan langkah konkrit bila diterapkan dalam pendidikan yang berbasis pesantren. Dalam kerangka ini, pendidikan diperuntukkan untuk semua, tanpa terkecuali. Sebab, manusia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Apabila ada sebagian anggota masyarakat, sebodoh apapun yang tersingkir dari kebijakan kependidikan berarti kebijakan tersebut telah meninggalkan sisi kemanusiaan yang setiap saat harus diperjuangkan.

Nilai kemanusiaan terwujud dengan adanya pemerataan yang tidak mengalami bias gender. Masalah pendidikan, antara anak perempuan dan anak laki-laki hendaknya harus seimbang. Anak perempuan, sebagaimana anak laki-laki harus punya hak/kesempatan untuk sekolah lebih tinggi. Bukan menjadi alternatif kedua jika kekurangan biaya untuk sekolah. Dalam hal ini KH. Husein Muhammad mengatakan:

“Islam menyerukan adanya kemerdekaan, persamaan dan kesempatan yang sama antara yang kaya dan yang miskin dalam bidang pendidikan di samping penghapusan sistem-sistem kelas-kelas dan mewajibkan setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu serta memberikan kepada setiap muslim itu segala macam jalan untuk belajar, bila mereka memperlihatkan adanya minat dan bakat. Saya kira ini sesuai dengan tuntunan Nabi yang secara eksplisit ada dalam hadits Nabi dan Al-Qur'an.”

Dengan demikian, pendidikan kerakyatan seharusnya memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu perempuan, bukan hanya diarahkan pada pendidikan agama *an sich*, dan ekonomi rumah tangga melainkan juga masalah pertanian dan keterampilan lain. Pendidikan dan bantuan terhadap perempuan dalam semua bidang tersebut akan menjadikan nilai yang amat besar, dan merupakan langkah awal untuk memperjuangkan persamaan yang sesungguhnya.

Pendidikan memang harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan zaman yaitu kualitas yang memiliki keimanan dan hidup dalam ketakwaan yang kokoh, mengenali, menghayati dan menerapkan akar budaya bangsa, berwawasan luas dan komprehensif, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan mutakhir, mampu mengantisipasi arah perkembangan, berpikir secara analitik, terbuka pada hal-hal yang baru, mandiri, selektif, mempunyai kepedulian sosial yang tinggi dan berusaha meningkatkan prestasi. Perempuan dalam pendidikannya juga diarahkan agar mendapatkan kualitas tersebut sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya.

IV. KESIMPULAN

Konsep pendidikan perspektif gender menurut KH. Husein Muhammad, adalah:

1. Pendidikan yang berbasis pada keadilan dan persamaan; keadilan dipahami sebagai pemberian hak yang jelas sesuai dengan tabiat dan rekayasa sosial, sedangkan persamaan adalah menyamakan status kesempatan antara laki-laki dan perempuan.
2. Pendidikan yang memberikan peluang dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan; dan ini bisa dibuktikan dengan tanpa adanya sekat-sekat kultural yang bisa mendiskreditkan peran perempuan, seperti hak mengajar, hak berpendapat, hak ruangan, dan hak sosial kultural.

Untuk merealisasikan prinsip kesetaraan dalam dunia pendidikan khususnya di pesantren, maka dalam pendidikan pesantren hendaknya menerapkan melakukan hal-hal sebagai berikut; (1) Reinterpretasi terhadap teks-teks klasik (Al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab klasik) yang bias terhadap perempuan. (2) menerapkan sebuah sistem demokratis dan egalitarian tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. (3) Menciptakan relasi yang berkeadilan dan kesetaraan gender. (4) Menumbuhkan daya kritisitas santri. Misi inilah yang perlu untuk di sosialisasikan sehingga umat Islam tidak mengalami penindasan, kebodohan dan terhindar dari kemiskinan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2009),
Ditulis oleh KH. Husein Muhammad dalam pengantar penulis dalam buku *Fiqh Perempuan Refleksi atas wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2007),
Eni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Alpha, 2005)
Fakhrudin ar-Razi, *At-Tafsir al-Kabir*, juz X, (Teheran: Dar al-Kutub, t.t.), . Yang dikutip dalam buku Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2007),
Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2007),
Jurnal Perempuan 61, Pendidikan, Media dan Gender,” *Ketika Gender Masuk Kurikulum Pesantren* (Jakarta, Desember 2008),
Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), Nasaruddin Umar, *Kodrati Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999),
M. Nuruzzaman, , *Kyai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005),
M. Nuruzzaman, , *Kyai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005),

Lihat dalam tulisan M. Nuruzzaman, *Kyai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), sebagai rujukan dari biografi KH. Husein Muhammad.

Ruth Indiah Rahayu, “*Politik Gender Orde Baru Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an*”, (dalam *PRISMA*, No. 5, Mei 1996),

Siti Musdah Mulia, dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003),

Siti Muslikhawati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004),

Siti Musdah Mulia, dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003),

Siti Murtiningsih, *Pendidikan Alat Perlawanan Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire*, (Yogyakarta: Resist Book, 2004),